

Anggaran Proyek Trem Bogor Capai Rp1,7 Triliun untuk Satu Koridor

BOGOR (IM)- Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam Infrastruktur dan kewilayahan, Sofie Linawati menjelaskan anggaran yang dibutuhkan dalam proyek pembangunan infrastruktur dan moda transportasi trem mencapai Rp 1,7 triliun untuk satu koridor.

Pemkot Bogor masih mencari investor karena dana tersebut tidak bisa diambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). "Ada beberapa triliun untuk satu koridor kalau enggak salah sampai ke Rp 1,7 triliun itu yang berlaku di tahun 2020. Sehingga memang ini cukup berat akan dikaji oleh APBD," ucap Sofie, Rabu (17/1).

Sofie menambahkan rencana koridor I moda trans-

portasi trem akan melalui Terminal Baranangsiang, Jalan Otto Iskandardinata, Juanda, Kapten Muslihat, Nyi Raja Permas, Dewi Sartika, Sawo Jajar, Sudirman, Pajajaran hingga kembali ke Baranangsiang.

Saat ini, Pemkot Bogor juga masih menunggu hasil review studi kelayakan atau feasibility study dari PT KAI. "Memang tidak mungkin bisa sendiri. Tetapi mungkin bisa menggandeng beberapa investor, jadi saat ini masih pada tahap saling menunggu review dari PT KAI dan juga mencari skema-skema pembangunan karena dengan APBD sepertinya sangat sulit," tutur Sofie. ● pra

Revitalisasi Pasar Baru Cikarang Dilelang Ulang

KAB. BEKASI (IM)- Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan skema lelang ulang revitalisasi Pasar Baru Cikarang setelah proses serupa yang dilakukan dengan batas akhir pendaftaran pada pekan kedua Januari 2024 hanya mendapatkan dua peserta.

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Gatot Purnomo menyatakan hingga batas akhir pelaksanaan pendaftaran lelang revitalisasi Pasar Baru Cikarang pada Rabu (10/1), baru dua peserta yang mendaftarkan diri.

"Minimal ada tiga peserta yang mendaftar mengikuti lelang revitalisasi pasar dan informasi baru dua peserta," kata Gatot di Cikarang, Rabu (17/1).

Dia mengatakan opsi lelang ulang disiapkan dengan koordinasi terkait pembahasan lanjutan bersama panitia lelang dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Bekasi.

"Jika jumlah peserta kurang dari tiga, kemungkinan besar proses lelang akan diulang. Namun, perlu dicatat bahwa untuk lelang kedua pun, jika peserta yang mendaftar tetap tidak mencapai tiga, langkah-langkah selanjutnya akan dipertimbangkan," katanya.

Dirinya mengaku opsi penunjukan langsung pun dimungkinkan apabila pada

lelang tahap kedua nanti tidak memenuhi batas minimal jumlah pendaftar dengan catatan perusahaan yang ditunjuk wajib memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.

Pihaknya memastikan menempuh prosedur resmi untuk menentukan investor yang layak untuk melaksanakan revitalisasi dan mengelola Pasar Baru Cikarang meskipun kondisi pasar sudah sangat memprihatinkan sehingga harus direvitalisasi. "Kami tidak ingin asal menentukan investor. Sebab kalau asal pilih investor hasilnya tidak maksimal. Maka para pedagang kembali dirugikan. Oleh sebab itu kami akan lebih selektif dalam menentukan, lebih baik agak lama namun hasil bisa maksimal," katanya.

Proses revitalisasi pasar ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2014. Pemerintah daerah saat itu menetapkan pemenang lelang yakni PT Sanjaya namun mereka tidak mampu melengkapi persyaratan dokumen yang diminta.

Pemerintah Kabupaten Bekasi telah memberikan beberapa kali kesempatan kepada pemenang lelang namun perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi persyaratan hingga akhirnya pemerintah daerah memutuskan mengakhiri kerja sama dengan PT Sanjaya. ● pp

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PENDIDIKAN CALON MASINIS KERETA CEPAT

Masinis asal Tiongkok (kedua kanan) memberi arahan kepada calon masinis saat mengikuti pendidikan mengemudi kereta cepat di Depo Kereta Cepat Tegalluar, Kab. Bandung, Jabar, Rabu (17/1). PT KCIC memberikan pendidikan dan pelatihan kepada 40 calon masinis kereta cepat guna menyiapkan SDM lokal yang mampu mengemudikan Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Ijazah Anak Ditahan Sekolah, Orangtua Siswa di Bandung Demo

Melalui aksi ini, diharapkan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin bisa segera menyelesaikan persoalan ini. Pasalnya, akibat penahanan ijazah ini para siswa kesulitan mencari kerja hingga melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi.

BANDUNG (IM)- Sejumlah orangtua siswa di Kota Bandung berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, menuntut pemerintah turun tangan menyelesaikan kasus penahanan ijazah, Rabu (17/1).

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa datang membawa spanduk dan papan protes bertuliskan tuntutan terhadap pemerintah Provinsi Jabar untuk segera turun tangan membesarkan persoalan kasus

penahanan ijazah ini. Selain itu, sebagian dari massa datang menggunakan seragam sekolah sebagai bentuk protes karena ijazah anaknya ditahan oleh pihak sekolah.

Koordinator Aksi, Furqan AMC menyebut, ada 414 ijazah siswa di Jabar yang masih ditahan oleh pihak sekolah dengan berbagai alasan, mulai dari persoalan administrasi dan lain sebagainya. "Aksi ini mewakili semua korban

yang ijazah semua anaknya ditahan. Ijazah yang ditahan di berbagai sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, MA, MTs baik negeri dan swasta," ujarnya di lokasi, Rabu (17/1).

Melalui aksi ini, diharapkan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin bisa segera menyelesaikan persoalan ini. Pasalnya, akibat penahanan ijazah ini para siswa kesulitan mencari kerja hingga melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi.

"Kami minta dengan hormat pada Gubernur Jabar agar segera memproses kasus ijazah yang ditahan ini agar segera pastikan ijazah anak yang ditahan dibebaskan segera diberikan karena anak butuh kepastian untuk masa depannya," tambah Furqan.

Selain itu, Furqan juga meminta Dinas Pendi-

kan kota dan kabupaten di Jabar menindak tegas sekolah maupun oknum penyelenggara pendidikan yang masih menahan ijazah siswa. "Evaluasi terhadap kinerja dinas pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang guna memastikan penahanan ijazah tidak terulang kembali," katanya.

Dia menambahkan, praktik penahanan ijazah siswa ini telah melanggar konstitusi dan peraturan undang-undang RI Pasal 31 ayat 1,2, dan 3. Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) 48 tahun 2008 Pasal 49 ayat 1. "Terus juga PP 48 tahun 2008 Pasal 52 Poin (e). Dan peraturan Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 23 Tahun 2020 Pasal 7 ayat 8," ucap Furqan.

Sementara itu, Santi Chadir (43), warga Su-

kaluyu, Kota Bandung mengaku, anaknya bersekolah dalam salah satu SMA swasta di Kota Bandung.

Selama lima tahun ijazah anaknya masih ditahan sekolah dengan alasan harus membesarkan tunggakan biaya administrasi. "Sudah lima tahun. Jangan putus harapan kami, jangan dipersulit sudah ada aturannya tapi kenapa dipersulit," ujarnya.

Dia berharap, tuntutan dirinya dan orang tua siswa lainnya bisa segera didengar oleh Pemprov Jabar sehingga ijazah yang masih ditahan oleh sekolah bisa segera dikembalikan.

"Saya bolak-balik bertahun-tahun meminta agar ada keringanan ijazah anaknya dikembalikan. Untuk minta fotocopy dan legalisir ijazah harus bayar Rp300 ribu," pungkasnya. ● pra

Expo Kreatifitas SMA Wujud Komitmen Merdeka Belajar Dunia Pendidikan

BOGOR (IM)- Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menghadiri kegiatan Expo Kreatifitas siswa SMA Terbuka Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Kabupaten Bogor yang berlangsung di Gedung Tegar Beriman, Cibinong Selasa (16/1).

Dalam kesempatan ini Asmawa Tosepu menyatakan apresiasi atas kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh para siswa dan siswi SMA terbuka, sebagai wujud nyata "Merdeka Belajar" dalam dunia pendidikan di Kabupaten Bogor.

Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mengungkapkan, Expo Kreatifitas siswa SMA Terbuka

merupakan komitmen para siswa dan jajarannya tenaga pendidik untuk menunjukkan mutu kualitas pembelajaran dunia pendidikan di SMA Terbuka Kabupaten Bogor.

"Atas nama Pemkab Bogor kami sangat apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Pemprov Jabar atas terselenggaranya SMA Terbuka di Kabupaten Bogor sebagai wujud nyata Merdeka Belajar dalam dunia pendidikan," tutur Asmawa Tosepu.

Lanjut Pj. Bupati Bogor bahwa semangat merdeka belajar bukan hanya sekadar tentang kebebasan memilih materi belajar, tetapi kebebasan mengakses kanal

pendidikan yang tersedia yang melampaui batas geografis, sosial dan ekonomi.

Wahyu Wijaya mengungkapkan, bahwa melalui kegiatan Expo Kreatifitas ingin menunjukkan kualitas Pendidikan SMA Terbuka memiliki kualitas yang setara dan sama baiknya dengan sekolah formal lainnya.

"Semoga melalui kegiatan tersebut bisa menjadi wadah dalam mengasah dan menggali kreatifitas sebagai bekal untuk masa depan bisa menjadi bekal untuk bisa bersaing dengan lainnya, sebagai gerbang menuju kesuksesan," ujarnya. ● gio



IDN/ANTARA

REALISASI PEMBAGIAN ALAT MASAK BERBASIS LISTRIK

Petugas PT Pos Indonesia (Persero) menyerahkan alat penanak nasi gratis kepada warga penerima bantuan di Kampung Pulo Empang, Kel. Paleang, Kota Bogor, Jabar, Rabu (17/1). Kementerian ESDM mencatat realisasi program pembagian alat masak berbasis listrik gratis telah mencapai 342.000 unit sepanjang 2023.

Pemkab Bekasi Berpotensi Kehilangan Pendapatan Rp7,8 Miliar

KAB. BEKASI (IM) Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berpotensi kehilangan pendapatan asli daerah mencapai Rp7,8 miliar dari sektor uji kendaraan bermotor atau KIR sebagai dampak regulasi pusat berkaitan dengan pembebasan biaya retribusi dimaksud.

"Proyeksi ini berdasarkan pendapatan daerah dari retribusi uji KIR 2023 sebesar Rp7,8 miliar atau sekitar 98 persen dari target tahun lalu tersebut," kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Yana Suyatna di Cikarang, Rabu (17/1).

Dia mengatakan regulasi pembebasan biaya retribusi uji KIR yang diberlakukan sejak 1 Januari 2024 berdampak pada penghapusan target pendapatan asli daerah dari sektor tersebut mulai

tahun ini. Hal ini sebagaimana tertuang dalam amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 tahun 2023 menyangkut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Setelah pemberlakuan uji KIR gratis ini, tidak ada lagi target PAD (Pendapatan Asli Daerah) karena aturan di atasnya sudah menghapus biaya," katanya.

Yana mengatakan kebijakan penghapusan biaya KIR ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kondisi kendaraan yang laik jalan, terutama kendaraan angkutan barang dan penumpang umum setiap enam bulan sekali. ● pp



151

Pj. Bupati Bogor sebut expo kreatifitas SMA terbuka, wujud komitmen merdeka belajar dunia pendidikan.

Indeks SPBE Naik, Raih Predikat Sangat Baik Tingkat Nasional

BOGOR (IM)- Mengawali tahun 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berhasil memperoleh prestasi membanggakan yakni berhasil meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari nilai 3,33 menjadi 3,71 atau dari kategori predikat "Baik" menjadi "Sangat Baik" predikatnya.

Ia menambahkan, penerapan dan peningkatan nilai SPBE menjadi hal penting dan harus dilakukan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, karena telah tertuang dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Maka penilaian dilakukan untuk mengukur sejauh mana implementasi penyelenggaraan transformasi digital melalui SPBE, karena indeks reformasi birokrasi salah satunya ditentukan oleh indeks SPBE semakin tinggi maka semakin tinggi indeks reformasi birokrasinya," ungkap Muhidin.

"Alhamdulillah tahun ini kami berhasil meningkatkan nilai SPBE dari 3,33 menjadi 3,71 atau dari predikat baik menjadi sangat baik, semoga kita tidak hanya mempertahankan akan tetapi bisa meningkatkan hingga predikat memuaskan bahkan sempurna kedepannya," paparnya. ● gio

Menurutnya, untuk memantau dan mengevaluasi pengembangan SPBE maka perlu dilakukan penilaian oleh Menpan RB salah